

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan kinerja perlu mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pada era globalisasi saat ini, pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi beberapa faktor berkaitan penggunaan teknologi informasi yang berkembang pesat untuk menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus menciptakan *good governance* untuk mencapai kinerja yang semakin baik.

Pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pemerintah daerah secara mandiri terjadi karena diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kinerja dalam mengelola pemerintahan dan keuangan semakin baik, karena pemerintah daerah dapat mengelola atau mengatur sesuai dengan kondisi dan permasalahan di daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini berkaitan dengan seberapa besar kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam

pengelolaan keuangan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Dalam situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi menjelaskan bahwa kontribusi BPK bisa dilihat dari meningkatnya opini yang diraih pemerintah daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) terus meningkat dari 0,65% (3 LKPD) pada tahun 2006 menjadi 76% (411 LKPD) pada tahun 2017. Namun demikian, Moermahadi juga menyatakan peningkatan kualitas LKPD tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang terjadi pada tahun 2016.

Era reformasi dan otonomi daerah telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah. Pemerintah daerah mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak hanya mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan undang-undang (UU) dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksa eksternal (BPK). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara efektif, efisien, ekonomis, dan patuh terhadap semua aturan serta mampu

mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu dan akuntabel.

Pertanggungjawaban menjadi peran penting dari dinas, kantor, dan badan pemerintahan daerah dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah, semua instansi ini harus dapat berkomitmen dan mempunyai integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 menyatakan bahwa; (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Hendawati, Komarasakti, dan Ansori (2017), umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (*financial*), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. Pelaksanaan tersebut identik dengan adanya tuntutan *good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah daerah yang baik terjadi karena adanya optimalisasi tata kelola keuangan, sehingga pemerintah daerah perlu menyusun anggaran.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Penganggaran akan membantu dalam proses pelaksanaan kinerja di pemerintah daerah. Peningkatan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran, semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, begitu juga dengan peran manajerial pengelola keuangan daerah (Herminingsih, 2009). Sebaliknya menurut Libersky (2013), partisipasi dalam penganggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Demikian juga penelitian Nazaruddin dan Setyawan (2012), menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik (Deputi IV BPKP, 2005).

Untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah perlu melaksanakan penatausahaan keuangan yang baik juga. Hasil penelitian Sari, Saiful, dan Aprilia (2013) menekankan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangandaerah. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman penatausahaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah. Namun berbeda hasil penelitian Ratih (2012) membuktikan bahwa penatausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa pemahaman penatausahaan oleh aparatur pengelola keuangan tidak berdampak pada kinerja mereka dalam mengelola keuangan daerah.

Aparatur pengelola keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dan menyusun laporan keuangan, supaya di masa mendatang laporan yang dibuat dapat dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan bahkan evaluasi dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Ertambang, 2008). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2009). Sedangkan penelitian Wati, Desiana, dan Sinarwati (2014) mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat (2015) bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan itu berkaitan dengan sumber daya manusia yang menyiapkan. Sumber daya manusia yang kompeten menghasilkan laporan yang baik. Hasil penelitian Safwan, Nadirsyah, dan Abdullah (2014) menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Selain sumber daya manusia yang kompeten, pelaporan laporan keuangan yang didukung penggunaan teknologi informasi akan menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Ringin, Razali, dan Hasnan (2015) yang menyatakan bahwa kapabilitas teknologi informasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja organisasi serta penelitian Rahman dan Zulkifli (2016) yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Fitri, Basri, Abdullah (2016) yang berjudul Pengaruh Penganggaran, Penatausahaan, Kualitas Pelaporan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah/OPD Pemerintah Kota Sabang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan penambahan variabel. Pada penelitian Fitri, dkk (2016) meneliti di SKPD Kota Sabang, sedangkan pada penelitian ini pada OPD Kota Madiun dan penambahan variabel kompetensi

sumber daya manusia yang didukung dari penelitian Tanzerina (2015) dan Safwan, dkk (2014).

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun?
2. Apakah penatausahaan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun?
3. Apakah kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun?
5. Apakah penganggaran, penatausahaan, kualitas pelaporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja

pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun dengan teknologi informasi sebagai variabel *moderating*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa:

1. Penganggaran berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
2. Penatausahaan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
3. Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
4. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.
5. Penganggaran, penatausahaan, kualitas pelaporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun dipengaruhi oleh teknologi informasi sebagai variabel *moderating*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dibahas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Bagi instansi pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.
3. Bagi akademisi, menambah suatu bukti empiris dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan mengenai pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual atau model penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; definisi operasional variabel dan pengukuran variabel; data dan prosedur pengumpulan data; lokasi dan waktu penelitian; teknik analisis data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data-data penelitian, hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.